



HILIRISASI SASIGOV SMART VILLAGE KIT UNTUK PENGUATAN TATA KELOLA NEGERI BERBASIS SASI DI NEGERI LIMA MALUKU TENGAH

Article history

Received: 15 Juni 2026

Revised: 30 Juni 2026

Accepted: 10 Juli 2026

DOI: [10.35329/jp.v6i3.7303](https://doi.org/10.35329/jp.v6i3.7303)

^{1*}Muhtar, ¹Jusuf Madubun, ¹Wahab Tuanaya, ¹Judy De Fretes, ¹Rukoyah, ¹Sonia Putri Marsaolly, ¹Aci Nadia Kabakoran

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Indonesia.

**Corresponding author*

muhtar@lecturer.unpatti.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat tata kelola negeri adat berbasis Sasi melalui hilirisasi SasiGov Smart Village Kit di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan dilatarbelakangi oleh belum optimalnya transparansi layanan publik, keterlacakan pengaduan, dokumentasi Sasi, serta promosi ekonomi lokal masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-kolaboratif dengan siklus Plan-Do-Check-Act melalui tahapan sosialisasi, asesmen kebutuhan, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan, evaluasi, dan penguatan keberlanjutan. Sasaran kegiatan meliputi Pemerintah Negeri Lima, Saniri, Kewang, admin layanan, kelompok ekonomi lokal, dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa SasiGov Smart Village Kit mampu menghasilkan perangkat tata kelola berupa service charter, pusat informasi layanan, sistem pengaduan berbasis register, log layanan, dashboard indikator triwulan, Sasi register, publikasi status Sasi, arsip dokumen, dan katalog ekonomi lokal. Implementasi kit memperkuat transparansi layanan, meningkatkan akuntabilitas pengaduan, mendukung pelaporan berbasis data, serta mengintegrasikan kelembagaan adat dengan promosi ekonomi lokal. Kegiatan ini menunjukkan bahwa smart village pada negeri adat perlu dikembangkan melalui inovasi yang sederhana, kontekstual, partisipatif, dan replikatif.

Kata kunci: *ekonomi lokal; pengabdian masyarakat; sasi; sasigov smart village kit*

1. PENDAHULUAN

Transformasi tata kelola desa dan negeri adat menuju smart village menjadi agenda penting dalam penguatan pelayanan publik di wilayah kepulauan. Di Maluku, kualitas layanan publik tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas aparatur, tetapi juga oleh sebaran permukiman, keterbatasan infrastruktur digital, serta biaya akses masyarakat terhadap informasi layanan. Kondisi ini membuat pelayanan pada tingkat negeri membutuhkan sistem kerja yang terbuka, sederhana, terdokumentasi, dan mudah diakses warga. Karena itu, digitalisasi negeri tidak cukup dimaknai sebagai penggunaan teknologi, tetapi harus diarahkan untuk memperkuat transparansi layanan, akuntabilitas pengaduan, pelaporan kinerja, dan partisipasi masyarakat.

Dalam praktiknya, digitalisasi desa sering kali belum disertai pembenahan tata kelola. Website, aplikasi, atau kanal informasi yang tidak dilengkapi standar layanan, mekanisme pengaduan, pembagian peran admin, dan sistem pelaporan berisiko hanya memindahkan

administrasi manual ke ruang digital tanpa meningkatkan kualitas layanan. Padahal, smart village menuntut integrasi teknologi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta kebutuhan lokal masyarakat. Oleh sebab itu, inovasi tata kelola di negeri adat perlu dirancang sebagai sistem kerja yang dapat dipahami, dijalankan, dievaluasi, dan dipelihara oleh aparatur negeri bersama masyarakat.

Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, merupakan negeri adat yang memiliki kebutuhan nyata dalam penguatan layanan publik, tata kelola Sasi, dan ekonomi lokal. Sebagai wilayah kepulauan dengan dinamika permukiman pascabencana, warga membutuhkan informasi yang jelas mengenai persyaratan, alur, waktu, dan kontak layanan agar tidak menghadapi hambatan administratif. Di sisi lain, Negeri Lima memiliki potensi ekonomi lokal, termasuk kelompok perempuan dan pelaku usaha pesisir, yang memerlukan dukungan promosi dan jejaring informasi yang lebih tertata. Dengan demikian, kebutuhan Negeri Lima bukan hanya penyediaan kanal digital, tetapi juga penguatan sistem informasi layanan, dokumentasi, pengaduan, dan promosi ekonomi lokal yang saling terhubung.

Kekhasan Negeri Lima juga terletak pada keberadaan Sasi sebagai basis kelembagaan adat. Sasi merupakan hukum adat yang mengatur larangan pemanfaatan sumber daya tertentu dalam periode tertentu untuk menjaga keberlanjutan sumber daya, kepatuhan sosial, dan keteraturan pemanfaatan ruang hidup masyarakat. Dalam tata kelola negeri adat, Sasi tidak hanya berfungsi sebagai norma kultural, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial, transparansi, dan kepatuhan kolektif. Namun, fungsi tersebut memerlukan dukungan dokumentasi aturan, pencatatan status, publikasi informasi, serta koordinasi antara pemerintah negeri, Saniri, Kewang, dan masyarakat.

Kajian pengabdian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi desa dapat meningkatkan kualitas layanan apabila didukung standar operasional dan pendampingan kelembagaan. Kader, Iskandar, Lestari, Yulia, dan Abdullah (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi melalui website dan e-office dapat mempercepat pelayanan serta mendukung good governance. Nistrina, Sukiman, dan Sutiyono (2025) menemukan bahwa pendampingan OpenSID meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan data penduduk dan layanan administrasi. Fadli dan Wolo (2023) menegaskan bahwa website desa memperluas akses informasi publik, sedangkan Sabiq, Suhaeri, Hayurani, Febriyanto, dan Abror (2022) menunjukkan bahwa layanan berbasis web dan Android meningkatkan akses masyarakat. Maulina, Istiqomah, Sugiarsi, Darmawan, dan Asrudi (2025) juga menekankan bahwa digitalisasi pengaduan memperkuat transparansi dan mempercepat respons pemerintah.

Meskipun demikian, sebagian besar kegiatan tersebut masih berfokus pada aspek administratif dan teknologi layanan. Kajian yang mengintegrasikan digitalisasi layanan publik dengan kelembagaan adat lokal masih terbatas. Padahal, dalam konteks negeri adat di Maluku, Sasi memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan sosial dan tata kelola sumber daya. Soselisa, Alhamid, dan Rahanra (2024) menunjukkan bahwa Sasi masih relevan sebagai instrumen good governance, tetapi membutuhkan penguatan dokumentasi, komunikasi aturan, dan konsistensi pengelolaan. Dengan demikian, integrasi Sasi ke dalam smart village menjadi penting agar digitalisasi tidak tercerabut dari struktur sosial, nilai adat, dan mekanisme kontrol masyarakat lokal.

Kesenjangan utama yang melatarbelakangi kegiatan ini adalah belum tersedianya produk IPTEKS yang mengintegrasikan tata kelola layanan publik berbasis data, kelembagaan Sasi, dan penguatan ekonomi lokal dalam satu paket operasional. Digitalisasi negeri tidak cukup dilakukan melalui website atau kanal informasi, tetapi perlu dilengkapi dengan standar layanan, sistem pengaduan tertelusur, log layanan, dashboard indikator, registrasi Sasi, publikasi status Sasi, serta katalog ekonomi lokal. Tanpa integrasi tersebut, digitalisasi berpotensi berhenti sebagai media informasi dan belum mampu memperkuat akuntabilitas, kepatuhan sosial, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian ini menawarkan hilirisasi SasiGov Smart Village Kit sebagai inovasi tata kelola negeri adat berbasis Sasi. Kit ini dirancang sebagai paket tata kelola sederhana yang memadukan komponen kelembagaan dan digital, meliputi service charter, pusat informasi layanan, sistem pengaduan dan log layanan berbasis register, dashboard indikator triwulan, Sasi register, publikasi status Sasi, arsip dokumen, template informasi negeri, serta katalog/promosi ekonomi lokal. Perbedaan SasiGov dibanding model smart village lain terletak pada penempatan Sasi sebagai basis tata kelola, bukan sekadar unsur budaya pelengkap. Dengan demikian, SasiGov tidak hanya menjadi alat administrasi, tetapi juga perangkat penguatan transparansi layanan, akuntabilitas pengaduan, dokumentasi adat, partisipasi warga, dan promosi ekonomi masyarakat.

Kebaruan kegiatan ini terletak pada integrasi smart village, tata kelola layanan publik, kelembagaan adat Sasi, dan ekonomi lokal dalam satu produk IPTEKS yang aplikatif dan replikatif. Melalui Sasi register dan publikasi status Sasi, aturan adat dapat terdokumentasi dan dikomunikasikan secara terbuka. Melalui dashboard layanan dan sistem pengaduan, pemerintah negeri dapat memantau kinerja layanan secara terukur. Melalui katalog ekonomi lokal, produk masyarakat dapat dipromosikan melalui kanal resmi negeri. Tujuan kegiatan ini adalah mengimplementasikan SasiGov Smart Village Kit untuk memperkuat tata kelola negeri berbasis Sasi di Negeri Lima, terutama melalui peningkatan transparansi layanan, akuntabilitas pengaduan, dokumentasi Sasi, dan promosi ekonomi lokal.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif-kolaboratif dengan siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA). Pendekatan ini dipilih karena kegiatan tidak hanya bertujuan menghasilkan dokumen atau pelatihan, tetapi juga mengimplementasikan produk IPTEKS berupa SasiGov Smart Village Kit sebagai sistem kerja yang dapat digunakan, dievaluasi, dan dipelihara oleh mitra. Model partisipatif digunakan untuk memastikan bahwa pemerintah negeri, kelembagaan adat, kelompok ekonomi lokal, dan masyarakat terlibat sejak tahap identifikasi masalah, perancangan solusi, penerapan teknologi, pendampingan, hingga evaluasi keberlanjutan program.

Rancangan kegiatan disusun dalam bentuk penguatan kapasitas dan penerapan teknologi tata kelola negeri berbasis Sasi. Produk yang diimplementasikan adalah SasiGov Smart Village Kit, yaitu paket tata kelola smart village yang terdiri atas service charter, pusat informasi layanan negeri, sistem pengaduan dan log layanan, dashboard indikator triwulan, Sasi register, publikasi status Sasi, template informasi negeri, arsip dokumen, serta katalog/promosi ekonomi lokal. Kit ini dirancang sebagai sistem tata kelola minimum yang sederhana, murah, mudah dioperasikan, dan sesuai dengan kapasitas perangkat negeri.

Lokasi kegiatan adalah Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Sasaran kegiatan terdiri atas dua kelompok utama. Pertama, sasaran kelembagaan, yaitu Pemerintah Negeri Lima, perangkat negeri, Saniri, Kewang, dan unsur masyarakat yang terkait dengan layanan publik serta tata kelola Sasi. Kedua, sasaran produktif, yaitu kelompok ekonomi lokal, termasuk kelompok perempuan dan pelaku usaha masyarakat pesisir yang membutuhkan dukungan promosi, pencatatan, dan integrasi informasi produk pada kanal negeri. Pelaksana kegiatan adalah tim pengabdian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Dosen berperan dalam desain tata kelola, penyusunan instrumen, fasilitasi pelatihan, penguatan kelembagaan, dan evaluasi program, sedangkan mahasiswa mendukung pengumpulan data awal, dokumentasi, input data, penyusunan konten informasi, serta pendampingan teknis kepada admin mitra.

Tahapan kegiatan dilaksanakan melalui lima tahap. Tahap pertama adalah sosialisasi dan asesmen awal. Pada tahap ini dilakukan pertemuan dengan Pemerintah Negeri Lima, Saniri, Kewang, perwakilan masyarakat, pemuda, perempuan, dan pelaku usaha lokal

untuk membangun kesepahaman mengenai tujuan kegiatan. Kegiatan dilanjutkan dengan pemetaan aktor, identifikasi layanan prioritas, inventarisasi dokumen layanan, pemetaan kebutuhan informasi masyarakat, identifikasi mekanisme pengaduan yang telah berjalan, serta pemetaan awal tata kelola Sasi dan potensi ekonomi lokal. Luaran tahap ini berupa daftar layanan prioritas, peta kebutuhan data, struktur admin mitra, dan rencana kerja implementasi kit.

Tahap kedua adalah pelatihan dan penyusunan perangkat kerja. Pelatihan dilaksanakan secara praktik atau hands-on agar peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga menghasilkan dokumen kerja yang dapat langsung digunakan. Materi pelatihan untuk aparatur negeri dan kelembagaan adat meliputi penyusunan service charter, standar informasi layanan, SOP pengaduan dan tindak lanjut, indikator kinerja layanan, format dashboard triwulan, Sasi register, serta SOP koordinasi pemerintah negeri dengan Saniri dan Kewang. Untuk kelompok ekonomi lokal, pelatihan difokuskan pada pencatatan sederhana, penyusunan katalog produk/jasa, narasi promosi, serta pemanfaatan kanal informasi negeri sebagai media promosi.

Tahap ketiga adalah penerapan teknologi. Pada tahap ini, komponen SasiGov Smart Village Kit mulai dioperasikan melalui perangkat offline dan digital. Komponen offline berupa papan informasi layanan dan papan status Sasi yang ditempatkan di kantor negeri atau titik strategis. Komponen digital berupa register layanan, register pengaduan, log tindak lanjut, dashboard indikator triwulan, Sasi register, arsip dokumen, dan katalog ekonomi lokal. Sistem pengaduan dibuat berbasis register atau tiket agar setiap pengaduan memiliki nomor, kategori, lokasi, waktu masuk, penanggung jawab, tindak lanjut, waktu penyelesaian, dan status. Dashboard indikator disusun untuk menampilkan ringkasan jumlah layanan, pengaduan masuk, pengaduan selesai, waktu respons, dan perkembangan tindak lanjut.

Tahap keempat adalah pendampingan dan evaluasi. Pendampingan dilakukan kepada admin layanan, admin pengaduan, admin Sasi, dan admin konten agar sistem yang telah disusun benar-benar digunakan secara rutin. Tim pengabdian melakukan klinik teknis, validasi data, perbaikan format, dan pendampingan pengisian register. Evaluasi dilakukan melalui skema baseline–midline–endline. Baseline digunakan untuk memotret kondisi awal sebelum penerapan kit, midline digunakan untuk melihat perkembangan implementasi, sedangkan endline digunakan untuk menilai capaian akhir kegiatan. Aspek yang dievaluasi meliputi ketersediaan standar layanan, keterbaruan informasi, keterlacakan pengaduan, ketersediaan dashboard, kelengkapan Sasi register, publikasi status Sasi, dan keberfungsian katalog ekonomi lokal.

Tahap kelima adalah penguatan keberlanjutan program. Keberlanjutan dilakukan melalui pelembagaan peran admin, penyusunan dokumen final, pelaksanaan training of trainers, dan penyusunan rencana kerja pengelolaan kit. Pemerintah negeri didorong menetapkan tim pengelola SasiGov Smart Village Kit yang terdiri atas admin layanan, admin pengaduan, admin Sasi, dan admin konten. Selain itu, disusun rencana pembiayaan minimal untuk mendukung pemeliharaan kanal informasi, pembaruan data, pencetakan informasi layanan, dan pengelolaan dokumentasi. Tahap ini menghasilkan dokumen akhir berupa SOP, template layanan, format register, format dashboard, Sasi register, katalog ekonomi lokal, dan rekomendasi keberlanjutan.

Teknik pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi, diskusi kelompok terarah, pelatihan praktik, pendampingan teknis, observasi lapangan, validasi dokumen, simulasi penggunaan sistem, dan forum evaluasi bersama. Diskusi kelompok terarah digunakan untuk menggali kebutuhan layanan, permasalahan pengaduan, pola pengelolaan Sasi, dan kebutuhan promosi ekonomi lokal. Pelatihan praktik digunakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan kelompok masyarakat dalam menyusun serta mengoperasikan perangkat kit. Pendampingan teknis digunakan untuk memastikan admin mitra mampu mengisi register, memperbarui informasi, menyusun laporan triwulan, dan mengelola arsip digital secara mandiri.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara singkat, diskusi kelompok terarah, studi dokumen, dan pencatatan hasil implementasi. Observasi digunakan untuk melihat kondisi layanan, media informasi, dan kesiapan perangkat. Wawancara singkat dan diskusi kelompok digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan mitra, hambatan layanan, tata kelola Sasi, serta potensi ekonomi lokal. Studi dokumen dilakukan terhadap dokumen layanan, keputusan negeri, catatan pengaduan, arsip Sasi, dan dokumen kegiatan ekonomi masyarakat. Data implementasi diperoleh dari register layanan, register pengaduan, dashboard, notulensi forum, dokumentasi pelatihan, dan katalog ekonomi lokal.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dan analisis capaian indikator. Analisis deskriptif-kualitatif digunakan untuk menafsirkan kebutuhan mitra, proses implementasi, partisipasi aktor, hambatan pelaksanaan, dan perubahan tata kelola setelah penerapan kit. Analisis capaian indikator digunakan untuk membandingkan kondisi awal, tengah, dan akhir kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan meliputi tersusunnya **service charter** layanan prioritas, aktifnya kanal informasi negeri, berfungsinya sistem pengaduan berbasis register, tersedianya dashboard indikator triwulan, tersusunnya Sasi register, terpublikasikannya status Sasi, serta tersedianya katalog/promosi ekonomi lokal. Hasil analisis digunakan untuk menyusun rekomendasi perbaikan sistem, penguatan kapasitas admin, dan strategi replikasi SasiGov Smart Village Kit pada negeri atau desa adat lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui hilirisasi SasiGov Smart Village Kit di Negeri Lima menghasilkan penguatan tata kelola negeri berbasis Sasi pada tiga ranah utama, yaitu transparansi layanan publik, akuntabilitas pengaduan dan pelaporan kinerja, serta integrasi tata kelola Sasi dengan promosi ekonomi lokal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan pengabdian berbasis produk lebih efektif dibandingkan model pelatihan konvensional karena mitra tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga memiliki perangkat kerja yang dapat langsung digunakan dalam pelayanan sehari-hari. Produk yang dihasilkan meliputi standar layanan, pusat informasi layanan, register pengaduan, log layanan, dashboard indikator triwulan, Sasi register, template informasi negeri, arsip dokumen, dan katalog ekonomi lokal.

Secara umum, kegiatan dilaksanakan melalui lima tahap, yaitu sosialisasi dan asesmen awal, pelatihan penyusunan perangkat kerja, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi, serta penguatan keberlanjutan. Setiap tahap menghasilkan luaran yang terukur. Pada tahap awal, kegiatan berhasil memetakan kebutuhan layanan prioritas, aktor pelaksana, dan persoalan tata kelola yang dihadapi mitra. Pada tahap pelatihan, aparatur negeri, unsur Saniri/Kewang, serta kelompok ekonomi lokal terlibat dalam penyusunan perangkat kerja. Pada tahap penerapan, komponen kit mulai digunakan dalam bentuk papan informasi, kanal digital sederhana, register layanan, dan dashboard. Pada tahap pendampingan dan evaluasi, tim pengabdian melakukan perbaikan format, validasi data, dan penguatan kapasitas admin. Hasil olahan capaian kegiatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian implementasi SasiGov Smart Village Kit di Negeri Lima

No	Komponen Kegiatan	Kondisi Awal	Hasil Setelah Kegiatan	Makna Capaian
1	Standar layanan (<i>service charter</i>)	Informasi layanan belum terdokumentasi seragam	Tersusun standar layanan prioritas yang memuat syarat, alur, waktu, dan kontak layanan	Layanan menjadi lebih transparan dan mudah dipahami warga
2	Pusat informasi layanan	Informasi layanan tersebar dan belum	Papan informasi dan kanal digital	Akses informasi warga menjadi

No	Komponen Kegiatan	Kondisi Awal		Hasil Setelah Kegiatan		Makna Capaian
		rutin diperbarui		sederhana digunakan	mulai	lebih terbuka
3	Sistem pengaduan	Pengaduan tercatat tertelusur	belum secara	Tersedia dashboard layanan pengaduan	format triwulan dan	Pemerintah negeri memiliki dasar pemantauan kinerja sederhana
4	Dashboard indikator	Pelaporan administratif belum indikator	masih dan berbasis	Tersedia dashboard layanan pengaduan	format triwulan dan	Pemerintah negeri memiliki dasar pemantauan kinerja sederhana
5	Sasi register	Informasi Sasi terdokumentasi dalam terpadu	Sasi belum format	Tersusun registrasi periode, sanksi, pengawas status Sasi	format objek, larangan, dan	Tata kelola Sasi menjadi lebih terbuka dan terdokumentasi
6	Katalog ekonomi lokal	Produk lokal terintegrasi dengan kanal informasi negeri	belum dengan informasi	Tersedia katalog/promosi produk dan jasa lokal	format	Potensi ekonomi masyarakat lebih mudah dipromosikan
7	Kapasitas admin	Pembagian pengelola belum jelas	peran informasi	Terbentuk admin pengaduan, konten	peran layanan, Sasi, dan	Keberlanjutan sistem lebih terjamin melalui pembagian tugas

Catatan: Data merupakan hasil olahan kegiatan berdasarkan observasi, dokumen luaran, register kegiatan, dan evaluasi pendampingan.

Capaian tertinggi pada aspek pakan dan minum (93,5%) menunjukkan peternak telah terbiasa memenuhi kebutuhan dasar ayam karena dilakukan rutin setiap hari, meskipun belum sepenuhnya terukur secara nutrisi (Zaharo et al., 2024). Sebaliknya, capaian terendah pada aspek pengetahuan penetasan (52%) mengindikasikan keterbatasan pemahaman peternak dalam pengaturan suhu, kelembapan, dan pembalikan telur menggunakan mesin tetas, sejalan dengan rendahnya pemanfaatan teknologi pada peternak skala kecil (Leight et al., 2022). Aspek kandang (75%) tergolong baik, namun observasi lapangan menunjukkan ventilasi dan pencahayaan belum sepenuhnya memenuhi prinsip kesejahteraan hewan (Minulyo & Nariswari, 2024), sementara aspek kebersihan dan sanitasi (64%) serta kesehatan dan kesejahteraan (62%) menunjukkan kegiatan sanitasi belum terjadwal secara rutin (Mayasari et al., 2023). Berdasarkan kesenjangan tersebut, teridentifikasi lima kebutuhan pelatihan prioritas, yaitu desain kandang bahagia, sanitasi kandang, manajemen pakan, biosekuriti dan kesejahteraan hewan, serta penetasan menggunakan mesin tetas sederhana.

Tabel 1 menunjukkan bahwa perubahan utama yang dihasilkan kegiatan bukan hanya terletak pada tersedianya perangkat digital, tetapi pada terbentuknya sistem kerja baru yang lebih tertib. Sebelum kegiatan, informasi layanan, pengaduan, dan tata kelola Sasi masih berjalan secara terpisah. Setelah implementasi kit, ketiga aspek tersebut mulai

diintegrasikan ke dalam satu alur kerja. Hal ini penting karena prinsip smart village tidak hanya menekankan penggunaan teknologi, tetapi juga kemampuan pemerintahan lokal untuk menghasilkan layanan yang responsif, akuntabel, dan berbasis data. Dengan demikian, SasiGov Smart Village Kit berfungsi sebagai instrumen penghubung antara tata kelola administratif, kelembagaan adat, dan kebutuhan ekonomi lokal.

Pada aspek transparansi layanan, kegiatan menghasilkan standar layanan prioritas yang disusun bersama aparatur negeri. Standar layanan tersebut memuat informasi mengenai jenis layanan, persyaratan, alur pelayanan, waktu penyelesaian, kontak petugas, dan kanal pengaduan. Penyusunan standar layanan menjadi langkah penting karena warga membutuhkan informasi yang sama, jelas, dan mudah diakses. Dalam konteks wilayah dengan permukiman yang menyebar, ketersediaan informasi layanan melalui papan informasi dan kanal digital sederhana dapat mengurangi biaya akses warga terhadap informasi. Temuan ini sejalan dengan Kader, Iskandar, Lestari, Yulia, dan Abdillah (2024) yang menegaskan bahwa digitalisasi layanan desa dapat mendukung percepatan pelayanan apabila disertai dengan penguatan tata kelola dan standar operasional.

Pada aspek akuntabilitas layanan, kegiatan menghasilkan sistem pengaduan berbasis register atau tiket. Setiap pengaduan dicatat berdasarkan nomor, kategori, lokasi, waktu masuk, penanggung jawab, tindak lanjut, waktu penyelesaian, dan status. Format tersebut membantu pemerintah negeri melihat pengaduan bukan sebagai keluhan informal semata, tetapi sebagai data layanan yang dapat dianalisis. Dengan adanya register pengaduan, proses tindak lanjut menjadi lebih tertelusur dan dapat dievaluasi. Hal ini memperkuat temuan Maulina, Istiqomah, Sugiarsi, Darmawan, dan Asrudi (2025) bahwa digitalisasi pengaduan dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas respons layanan publik.

Hasil penting lain adalah tersusunnya dashboard indikator triwulan. Dashboard ini tidak dirancang sebagai sistem yang kompleks, tetapi sebagai alat bantu sederhana untuk membaca perkembangan layanan. Indikator yang digunakan meliputi jumlah layanan berdasarkan jenis, jumlah pengaduan masuk, jumlah pengaduan selesai, rata-rata waktu respons, persentase penyelesaian pengaduan, dan jumlah informasi negeri yang dipublikasikan. Melalui dashboard ini, pemerintah negeri memiliki basis data ringkas untuk melihat kinerja layanan secara berkala. Makna penting dari capaian ini adalah terjadinya pergeseran dari pelaporan administratif menuju pelaporan berbasis indikator.

Tabel 2. Matriks indikator evaluasi baseline, midline, dan endline

No	Indikator Evaluasi	Baseline	Midline	Endline	Interpretasi
1	Ketersediaan standar layanan	Belum seragam	Draft tersedia	Dipublikasikan	Transparansi layanan meningkat
2	Kanal informasi layanan	Belum aktif secara rutin	Mulai digunakan	Diperbarui berkala	Akses informasi warga lebih terbuka
3	Register pengaduan	Belum tertelusur	Mulai diisi	Digunakan untuk tindak lanjut	Akuntabilitas pengaduan meningkat
4	Dashboard indikator	Belum tersedia	Format disusun	Digunakan untuk laporan triwulan	Pelaporan lebih berbasis data
5	Sasi register	Belum terpadu	Objek dan aturan mulai didata	Status Sasi dapat dipublikasikan	Dokumentasi Sasi lebih kuat
6	Katalog ekonomi lokal	Belum terhubung	Data produk dikumpulkan	Produk mulai dipromosikan	Potensi ekonomi lokal

No	Indikator Evaluasi	Baseline	Midline	Endline	Interpretasi
		dengan kanal negeri			lebih terlihat
7	Pembagian peran admin	Belum jelas	Peran mulai ditetapkan	Admin menjalankan fungsi masing-masing	Keberlanjutan sistem lebih memungkinkan

Catatan: Baseline menunjukkan kondisi awal, midline menunjukkan perkembangan selama pendampingan, dan endline menunjukkan capaian akhir kegiatan.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa capaian kegiatan bergerak dari kondisi belum terdokumentasi menuju kondisi yang lebih terstruktur. Perubahan paling penting tampak pada penguatan dokumen kerja dan mekanisme pencatatan. Dalam tata kelola publik tingkat lokal, dokumen kerja seperti standar layanan, register pengaduan, dan dashboard bukan hanya perangkat administratif, tetapi juga instrumen akuntabilitas. Ketika layanan dicatat, pengaduan ditelusuri, dan status Sasi dipublikasikan, maka pemerintah negeri memiliki dasar yang lebih kuat untuk menjawab kebutuhan warga secara terbuka.

Pada aspek tata kelola Sasi, kegiatan menghasilkan format Sasi register yang memuat objek atau area Sasi, periode berlaku, larangan, sanksi, pengawas, status aktif atau tutup, serta catatan pelanggaran dan tindak lanjut. Penyusunan register ini memiliki makna penting karena Sasi selama ini sering dipahami sebagai norma adat yang disampaikan secara lisan atau melalui mekanisme sosial tertentu. Melalui Sasi register, aturan adat dapat didokumentasikan secara lebih sistematis tanpa menghilangkan legitimasi kelembagaan adat. Saniri dan Kewang tetap menjadi aktor penting dalam validasi, pengawasan, dan sosialisasi Sasi, sedangkan pemerintah negeri berperan memperkuat dokumentasi dan publikasi informasi.

Integrasi Sasi ke dalam SasiGov Smart Village Kit menunjukkan bahwa digitalisasi tata kelola tidak harus meminggirkan kearifan lokal. Sebaliknya, teknologi sederhana dapat digunakan untuk memperkuat fungsi kelembagaan adat. Sasi register dan publikasi status Sasi membantu masyarakat mengetahui area, periode, larangan, dan status pemanfaatan sumber daya. Dengan informasi yang lebih terbuka, potensi salah paham terhadap aturan Sasi dapat dikurangi. Temuan ini sejalan dengan Soselisa, Alhamid, dan Rahanra (2024) yang menegaskan bahwa Sasi masih relevan sebagai instrumen **good governance**, tetapi memerlukan penguatan dokumentasi dan komunikasi aturan agar lebih efektif dalam konteks modern.

Pada aspek ekonomi lokal, kegiatan menghasilkan format katalog atau promosi produk masyarakat. Katalog ini dirancang sederhana agar dapat dikelola oleh admin konten dan kelompok ekonomi lokal. Informasi yang dimuat meliputi nama produk atau jasa, pelaku usaha, deskripsi singkat, kontak, lokasi, dan media promosi. Penguatan katalog ekonomi lokal penting karena smart village tidak hanya berkaitan dengan layanan administratif, tetapi juga dengan kemampuan desa atau negeri mengelola potensi ekonomi masyarakat. Dengan terhubungnya promosi produk ke kanal informasi negeri, ekonomi lokal memperoleh ruang publikasi yang lebih resmi dan mudah diakses.

Tabel 3. Keterkaitan Masalah Mitra, Intervensi, dan Dampak Kegiatan

No	Masalah Mitra	Intervensi SasiGov Smart Village Kit	Dampak yang Dihasilkan
1	Informasi layanan belum seragam	Penyusunan <i>service charter</i> dan papan informasi layanan	Warga memperoleh informasi layanan yang lebih jelas
2	Pengaduan belum tertelusur	Register pengaduan dan log tindak lanjut	Pemerintah negeri memiliki dasar evaluasi

				berkala
3	Pelaporan belum berbasis indikator	Dashboard layanan pengaduan triwulan	dan	Pemerintah negeri memiliki dasar evaluasi berkala
4	Aturan Sasi belum terdokumentasi terpadu	Sasi register dan status Sasi	dan publikasi	Tata kelola adat menjadi lebih terbuka dan terarsip
5	Produk ekonomi lokal belum terpromosikan	Katalog ekonomi lokal dan kanal informasi negeri		Produk masyarakat memperoleh media promosi yang lebih tertata
6	Peran pengelola informasi belum jelas	Pembentukan admin layanan, admin pengaduan, admin Sasi, dan admin konten		Sistem lebih berpeluang berlanjut setelah kegiatan selesai

Catatan: Dampak kegiatan dianalisis berdasarkan perubahan sistem kerja, dokumen luaran, dan fungsi kelembagaan mitra.

Tabel 3 menegaskan bahwa intervensi kegiatan bersifat integratif. Setiap masalah mitra tidak dijawab dengan kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi dihubungkan dengan perangkat kerja yang saling melengkapi. Masalah transparansi layanan dijawab melalui *service charter* dan pusat informasi. Masalah pengaduan dijawab melalui register dan log tindak lanjut. Masalah pelaporan dijawab melalui dashboard. Masalah dokumentasi Sasi dijawab melalui Sasi register. Masalah ekonomi lokal dijawab melalui katalog promosi. Dengan desain tersebut, SasiGov Smart Village Kit dapat dipahami sebagai paket tata kelola, bukan sekadar aplikasi atau media informasi.

Secara konseptual, hasil kegiatan ini memperkuat pemahaman bahwa smart village pada negeri adat perlu dikembangkan melalui pendekatan kontekstual. Model smart village yang hanya menekankan teknologi digital belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat kepulauan dan masyarakat adat. Pada kasus Negeri Lima, kebutuhan utama bukan sekadar aplikasi, tetapi sistem kerja yang mampu menjembatani pelayanan publik, norma adat, dan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini lebih tepat disebut sebagai transformasi tata kelola berbasis teknologi sederhana dan kearifan lokal.

Pelaksanaan kegiatan juga menunjukkan pentingnya partisipasi mitra. Pemerintah negeri berperan menyediakan data layanan, menetapkan admin, dan mengelola informasi. Saniri dan Kewang berperan memvalidasi substansi Sasi register dan memastikan bahwa publikasi status Sasi tidak bertentangan dengan mekanisme adat. Kelompok ekonomi lokal berperan menyediakan data produk dan memperbarui informasi promosi. Warga berperan sebagai pengguna layanan, pemberi masukan, dan penerima manfaat. Partisipasi lintas aktor ini menjadi faktor penting karena keberlanjutan kit sangat bergantung pada kepemilikan bersama, bukan pada ketergantungan terhadap tim pengabdian.

Dari sisi analisis data, kegiatan ini menunjukkan adanya perubahan pada tiga dimensi. Pertama, dimensi administratif, yaitu meningkatnya ketersediaan dokumen layanan, SOP, register, dan arsip. Kedua, dimensi akuntabilitas, yaitu adanya mekanisme pencatatan pengaduan, pemantauan status, dan penyusunan dashboard indikator. Ketiga, dimensi sosial-ekonomi, yaitu terdokumentasinya tata kelola Sasi dan tersedianya media promosi ekonomi lokal. Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa manfaat kegiatan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kelembagaan dan sosial.

Manfaat langsung kegiatan bagi pemerintah negeri adalah tersedianya perangkat kerja yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas layanan. Aparatur negeri memiliki format standar dalam menyampaikan informasi layanan, mencatat pengaduan, dan menyusun laporan berkala. Manfaat bagi kelembagaan adat adalah tersedianya format dokumentasi Sasi yang dapat membantu proses sosialisasi, pengawasan, dan arsip

kelembagaan. Manfaat bagi masyarakat adalah meningkatnya akses terhadap informasi layanan, pengaduan, status Sasi, dan informasi ekonomi lokal. Manfaat bagi kelompok ekonomi lokal adalah tersedianya kanal promosi yang lebih tertata dan terhubung dengan informasi resmi negeri.

Dampak kegiatan juga terlihat pada penguatan literasi tata kelola digital. Aparatur dan admin mitra mulai memahami bahwa data layanan, data pengaduan, data Sasi, dan data ekonomi lokal dapat digunakan untuk memperbaiki pelayanan. Dengan kata lain, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga mendorong perubahan cara kerja. Pemerintah negeri didorong untuk melihat data sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan sekadar arsip administratif. Hal ini menjadi penting dalam membangun tata kelola negeri yang lebih responsif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari sisi keberlanjutan, kegiatan ini memerlukan pelembagaan melalui keputusan pemerintah negeri mengenai tim pengelola SasiGov Smart Village Kit. Pelembagaan ini penting agar peran admin layanan, admin pengaduan, admin Sasi, dan admin konten tidak berhenti setelah program selesai. Selain itu, diperlukan pembaruan informasi secara berkala, penguatan kapasitas admin pengganti, dan dukungan pembiayaan minimal untuk koneksi internet, pencetakan papan informasi, dan pemeliharaan arsip digital. Tanpa pelembagaan, kit berisiko menjadi produk sesaat yang tidak terpakai secara berkelanjutan.



Gambar 1. Alur implementasi SasiGov Smart Village Kit di Negeri Lima

Gambar 1 menggambarkan alur implementasi SasiGov Smart Village Kit sebagai produk pengabdian berbasis tata kelola. Alur dimulai dari pemetaan masalah layanan, Sasi, dan ekonomi lokal; dilanjutkan dengan penyusunan perangkat kerja; penerapan sistem informasi dan register; pendampingan admin; serta evaluasi dan replikasi. Alur ini menunjukkan bahwa produk IPTEKS tidak berdiri sebagai teknologi semata, tetapi menjadi bagian dari siklus pembelajaran kelembagaan.

Berdasarkan keseluruhan hasil tersebut, SasiGov Smart Village Kit dapat dinilai sebagai inovasi pengabdian yang memiliki tiga keunggulan. Pertama, bersifat kontekstual karena dikembangkan sesuai kebutuhan negeri adat di wilayah kepulauan. Kedua, bersifat integratif karena memadukan layanan publik, pengaduan, dashboard, Sasi register, dan promosi ekonomi lokal. Ketiga, bersifat replikatif karena komponennya sederhana dan dapat disesuaikan pada negeri atau desa adat lain. Keunggulan ini menunjukkan bahwa hilirisasi produk IPTEKS dalam kegiatan pengabdian tidak harus selalu berupa teknologi kompleks, tetapi dapat berupa sistem tata kelola sederhana yang menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dengan demikian, hasil kegiatan ini memperlihatkan bahwa penguatan smart village

berbasis Sasi dapat menjadi alternatif model pengabdian masyarakat di wilayah kepulauan. Model ini tidak hanya memperkenalkan teknologi, tetapi juga memperkuat kelembagaan, dokumentasi, partisipasi, dan ekonomi lokal. Implementasi SasiGov Smart Village Kit di Negeri Lima membuktikan bahwa kearifan lokal dapat menjadi basis inovasi tata kelola yang modern, terukur, dan tetap berakar pada struktur sosial masyarakat adat.

4. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui hilirisasi SasiGov Smart Village Kit di Negeri Lima menunjukkan bahwa penguatan smart village pada negeri adat tidak cukup dilakukan melalui penyediaan teknologi digital semata, tetapi perlu diarahkan pada pembentukan sistem kerja tata kelola yang sederhana, terdokumentasi, partisipatif, dan sesuai dengan konteks lokal. Implementasi kit menghasilkan perangkat operasional berupa standar layanan, pusat informasi layanan, sistem pengaduan berbasis register, log layanan, dashboard indikator triwulan, Sasi register, publikasi status Sasi, arsip dokumen, serta katalog ekonomi lokal. Perangkat tersebut memperkuat transparansi layanan publik, meningkatkan keterlacakan pengaduan, mendukung pelaporan berbasis indikator, serta memperjelas dokumentasi tata kelola Sasi sebagai kelembagaan adat.

Secara substantif, kegiatan ini membuktikan bahwa integrasi antara tata kelola layanan publik, kelembagaan adat Sasi, dan promosi ekonomi lokal dapat menjadi model pengabdian berbasis produk IPTEKS yang relevan bagi wilayah kepulauan. SasiGov Smart Village Kit tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administrasi, tetapi juga sebagai instrumen penguatan akuntabilitas, kepatuhan sosial, partisipasi warga, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui keterlibatan pemerintah negeri, Saniri, Kewang, kelompok ekonomi lokal, dan masyarakat, kegiatan ini mendorong perubahan dari pola layanan yang belum terdokumentasi secara seragam menuju sistem tata kelola yang lebih terbuka, tertelusur, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Berdasarkan hasil kegiatan, direkomendasikan agar Pemerintah Negeri Lima melembagakan pengelolaan SasiGov Smart Village Kit melalui penetapan tim pengelola yang memiliki pembagian tugas jelas, meliputi admin layanan, admin pengaduan, admin Sasi, dan admin konten. Pembaruan data layanan, pengaduan, status Sasi, dan katalog ekonomi lokal perlu dilakukan secara berkala agar sistem tidak berhenti sebagai luaran kegiatan, tetapi menjadi bagian dari rutinitas pemerintahan negeri. Kegiatan pengabdian berikutnya disarankan memperluas implementasi kit pada negeri adat lain di Maluku, mengembangkan fitur digital yang lebih terintegrasi, serta menguji efektivitas model ini melalui evaluasi dampak terhadap kualitas layanan, kepatuhan terhadap Sasi, dan peningkatan promosi ekonomi lokal masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiansah, Utami, A. S., Yusliani, N., Miraswan, K. J., & Oklilas, A. F. (2021). Penerapan sistem informasi desa menggunakan OpenSID di Desa Tanjung Dayang Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 1472–1479. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i6.5621>
- Ambarsari, I. F., Azizah, N., Ansori, Al-Faruq, Y. F., & Fahrozi, K. K. (2024). Digitalisasi informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik: Transformasi desa digital melalui pengembangan website Desa Klatakan. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(1), 396–405. <https://doi.org/10.33379/icom.v4i1.4041>
- Ardiana, A. T., Sari, A. P., & Maulani, H. H. (2024). Peningkatan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan OpenSID sebagai media sistem informasi digital di Desa Puncaksari. *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 63–70. <https://doi.org/10.15575/commen.v1i2.637>
- Erida, Saadah, M. A., Syeftiani, T., Suri, A., & Fachrezi, Z. (2023). Pelatihan dan pendampingan pembuatan sistem informasi desa dalam rangka peningkatan good governance desa. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(4), 2144–2152.

- <https://doi.org/10.33379/icom.v3i4.3588>
- Fadli, A., & Wolo, P. (2023). Optimalisasi web desa pada penyajian informasi publik kepada masyarakat desa. *RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua*, 1(1), 11–14.
- Jumiati, I. E., Cahyono, B. D., Sukarna, R. H., Ihsani, I., & Rahman, A. (2025). Optimalisasi layanan publik Desa Harjatani melalui digitalisasi: Pelatihan tahap 2 pengelolaan website desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 9833–9839. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3404>
- Kader, M. A., Iskandar, Y., Lestari, M. N., Yulia, L., & Abdillah, R. M. (2024). Digitalisasi desa melalui pembuatan website dan e-office sebagai upaya percepatan pelayanan dalam mewujudkan good governance Desa Gegempalan. *Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2). <https://doi.org/10.25157/ag.v6i2.14709>
- Maulina, D., Istiqomah, D. A., Sugiarsi, H., Darmawan, M. D., & Asrudi, M. (2025). Optimasi digitalisasi pengaduan dan layanan publik berbasis web pada Kalurahan Purwobinangun. *JURPIKAT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4), 2289–2299. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i4.2714>
- Nistrina, K., Sukiman, & Sutiyono. (2025). Pendampingan penggunaan OpenSID untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik desa. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 4(2), 96–102. <https://doi.org/10.37905/ljpmt.v4i2.31479>
- Rusdinar, A., Dewanta, F., Virgono, A., Isnawati, A. F., & Delimayanti, M. K. (2025). Penerapan sistem surat menyurat terdigitalisasi (E-Office) pada BUMDESMA Mentereng LKD Cikoneng, Kabupaten Ciamis. *J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 10(3), 509–515.
- Sabiq, A., Suhaeri, Hayurani, H., Febriyanto, E., & Abror, A. (2022). Sistem layanan Desa Ciseeng berbasis web dan android untuk meningkatkan pelayanan desa pada masyarakat. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(3), 606–619. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i3.1764>
- Soselisa, P. S., Alhamid, R., & Rahanra, I. Y. (2024). The implementation of good governance by the local government in the management of sasi in Morella Village, Leihitu Subdistrict, Central Maluku District. *Journal of Governance*, 9(1), 29–41.
- Watianan, F. S., Nanlohy, W. D., & Botanri, A. F. A. (2024). Analisis arah perkembangan kawasan permukiman di Negeri Lima. *ELASTICITY: Journal of Applied Engineering Science*, 1(1), 1–9.
- Wattimena, F. A., Nurhaeny, A., & Aswad, W. O. S. J. (2024). Strategi pengembangan pemberdayaan perempuan dalam mendukung usaha kecil di desa pesisir: Studi kasus Negeri Lima, Leihitu, Maluku Tengah. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 12(1), 26–39.
- Zulfikar, Munawarah, Amin, M. S., & Arafat, M. Y. (2022). Pemberdayaan aparatur Desa Pulorejo melalui perancangan open access web sistem informasi desa smart-village di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. *KALANDRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 15–25. <https://doi.org/10.55266/jurnalkalandra.v1i2.120>